

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia memiliki keunikan tersendiri dari beberapa suku, agama, golongan dan budaya. Keunikan ini menciptakan keragaman yang saling terhubung dalam satu ikatan persatuan dan kesatuan. Namun, keragaman tidak selalu terealisasi dalam kolektivitas visi dan misi untuk menciptakan perdamaian yang Multikultural. Tentu tidak terlepas dari kolonialisme, di mana gerakan politik dan organisasi masyarakat mempunyai landasan ideologis untuk mencapai cita-cita yang besar dalam membangun negara yang diinginkan dan berkontribusi pada tanah air. Pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, gerakan politik Islam yang paling banyak eksis dalam memperjuangkan persatuan negara kesatuan republik Indonesia adalah partai syarikat Islam dan partai Masyumi yang memiliki nilai-nilai dasar keIslaman. Dengan berjalannya waktu, partai-partai Islam mulai tumbuh dan berkembang untuk menarik simpati masyarakat untuk ikut mendukung dan memperjuangkannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan Politik Islam tidak pernah sendirian dalam memperjuangkan ideologinya di Indonesia. Hal ini selalu berdampingan dengan partai-partai yang berideologi Komunisme dan Nasionalisme. Fenomena seperti ini membuat persaingan untuk merebut hati masyarakat yang berada di wilayah Indonesia untuk mencapai kekuasaan.

Kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Hizbut Tahri di Palestina yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani. Masuknya gerakan politik *Hizbut Tahrir* ke Indonesia dengan paham *khilafah Islamiyah* dirintis oleh KH. Abdullah Bin Nuh yang bertemu dengan Abdurrahman Al-Baghdadi di Sydney (aktivis HT di Australia) pada tahun 1980 M (Khadafi, 2017) dan merintis dakwah politiknya ke kampus-kampus besar seperti IPB, UI, UGM, UNY, ITB dan UNPAD. Strategi seperti ini merupakan tahap awal untuk menarik simpatisan cendekiawan dan aktivis yang ingin menjadi relawan anggota atau kader dari Hizbut Tahrir Indonesia. Secara tidak langsung, pemahaman gerakan politik Hizbut

Tahrir Indoensia dapat diterima oleh masyarakat dan cendekiawan Islam secara *under ground* pada masa orde baru.

Tentu saja, pada masa orde baru, setiap organisasi masyarakat (ORMAS) dijaga ketat oleh kepemimpinan Soeharto. Dimana semua organisasi harus berlandaskan asas Pancasila dan implementasi tidak nampak sama sekali dengan nilai-nilai Pancasila yang dipimpin oleh Soeharto. Sehingga pemerintahan masa orde baru mulai menonjolkan sikap kepemimpinannya yang otoriter dan diktator. Setelah runtuhnya orde baru dan bertransisi ke masa reformasi, kebebasan organisasi sudah mulai terbuka dan berbagai ideologi (pemahaman) masuk ke Indonesia secara terang-terangan salah satunya gerakan *Hizbut Tahrir Indonesia*. Pada tahun 2000-an, HTI sudah merasakan kebebasan untuk berekspresi dan berpolitik di depan umum dengan melakukan aktivitas politik seperti menyebarkan ide-ide atau gagasan tentang pemahaman *khilafah Islamiyah*. HTI telah mendapat pengakuan hukum dari negara untuk diberikan ruang bebas yang luas dalam agenda tujuan seperti yang telah dilakukan oleh gerakan atau organisasi masyarakat lainnya. Hal yang paling mengejutkan dari HTI adalah hasil perjuangan mereka untuk menyebarkan dan mempropaganda agenda politik kepada masyarakat di Indonesia sangatlah besar. Bagi gerakan HTI, ini merupakan awal sejarah yang sangat baik bagi kemajuan organisasinya di Indonesia, namun bagi pemerintah dan kelompok lain yang bertentangan dengan pemahaman mereka, itu merupakan ancaman bagi kepentingan politik mereka (Aswar, 2020). Karena sejarah pemerintah akan selalu berkonflik dengan kelompok-kelompok Muslim di Indonesia, maka tidak terlepas dari gerakan Daulah Islamiyah (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang dibubarkan oleh pimpinan Pak Soekarno.

Seiring berjalannya waktu, gerakan *Hizbut Tahrir Indonesia* memasuki fase krusial, di mana pada tanggal 19 Juli 2017 M (masa kepemimpinan pak Jokowi) telah dibubarkan organisasi *Hizbut Tahrir Indonesia* yang ber-pemahaman *khilafah* karena dianggap sebagai anti Pancasila. Dengan dikeluarkannya organisasi *Hizbut Tahrir Indonesia* berdasarkan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, telah diubah menjadi Undang-undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017. Dimana

kegiatan yang dilakukan oleh organisasi *Hizbut Tahrir Indonesia* telah menimbulkan benturan di masyarakat karena dianggap dapat mengancam keamanan dan ketertiban, serta membahayakan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) (Mansyur, 2019). Tentu *Hizbut Tahrir* bukanlah organisasi spiritual, lembaga ilmiah, lembaga sosial dan lembaga pendidikan. Melainkan organisasi politik.

Pembubaran organisasi *Hizbut Tahrir Indonesia* tidak lepas dari peran Jenderal TNI (Purn.) Wiranto yang merupakan menteri koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sekali lagi, pembubaran *Hizbut Tahrir Indonesia* didasarkan pada ideologi *khilafah* yang mengancam kedaulatan politik negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Tentu saja, pembubaran *Hizbut Tahrir Indonesia* tidak lepas dari kontroversi. Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan bahwa pembubaran organisasi *Hizbut Tahrir Indonesia* adalah pelanggaran terhadap hak menyatakan pendapat dan berserikat, dimana sudah termaktub di konstitusi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Tempo, 2017). Menurut Mahkamah Agung, organisasi *Hizbut Tahrir Indonesia* tidak sesuai dengan falsafah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sementara itu, juru bicara *Hizbut Tahrir Indonesia* (Ismail Yusanto) tidak terlalu terkejut dengan keputusan persidangan, karena budaya hukum di Indonesia sangat diskriminatif dan politis terhadap putusan akhir. Namun, opsi upaya hukum melalui peninjauan kembali masih terbuka (Berry, 2019). Prinsip dari sebuah negara demokrasi adalah menjunjung tinggi konstitusi dan ideologi dalam sebuah negara serta memberikan kebebasan dalam hak sosial dan politik bagi masyarakat, sehingga terjaminnya aspirasi yang tersalurkan dengan baik dari sistem demokrasi (Muten Nuna, 2019).

Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkapkan secara objektif. Apa alasan pemerintah membubarkan gerakan *hizbut tahrir Indonesia*. Benarkah pemahaman *khilafah* sangat berbahaya bagi Negara Indonesia yang ingin mengubah dasar Negara Pancasila. Benarkah rezim takut akan adanya paham *khilafah* yang kebenaran sejarahnya disembunyikan dan dikubur oleh para aktivis nasionalisme sekuler (rezim) dan ormas-ormas Islam kiri (liberal) dalam rangka mempertahankan kekuasaan melalui otoritas isi dari pancasila sesuai penafsiran petahana. Atau

pandangan (persepsi) pemerintah sangat sedikit memahami konsep khilafah seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan Soeharto yang tidak memberikan akses keterbukaan untuk berdiskusi, dialog atau merangkulnya. Padahal, menurut Ihsan Yilmaz, pemahaman khilafah sukses diterima di Negara-negara Eropa (Yilmaz, 2010) sedangkan di negara-negara Arab Timur Tengah, Mesir, Saudi Arabia Yordania dan Turkey mengalami jalan buntu dan kegagalan. Benarkah retorika pemahaman khilafah anti terhadap Pancasila sebagai strategi pembentukan rezim untuk menciptakan rasa nasionalisme terhadap Bangsa dan Negara di Indonesia. Namun ada beberapa literatur yang membedakan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain :

Pertama, Sudarno Shobron (2016) yang berjudul **Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia**. PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 1, Juni 2014: 44 – 62. Dalam penelitian ini penulis membahas Strategi yang dilancarkan oleh hizbut tahrir untuk mewujudkan khilafah yaitu ada dua periode yakni masa orde baru dan masa reformasi (sekarang ini). Pada masa orde baru dibawah pemerintahan soeharto, strategi yang dilakukan oleh hizbut tahrir melakukan secara tertutup (under ground) soeharto memberlakukan azas tunggal Pancasila dan de-islamisasi politik membuat gerakan-gerakan Islam terpaksa melakukan gerakan dibawah tanah, karena Islam menjadikan musuh utama oleh soeharto pada masa pasca runtuhnya komunisme. Pada jatuhnya orde baru dan masa reformasi, gerakan Islam dan gerakan lainnya yang under ground seperti HTI, salafi, dan lain-lainnya bernafas dengan lega, berani untuk mempromosikan melalui pamphlet atau media untuk mempropaganda masyarakat Indonesia. Dan membuat kaderisasi dan rekrutmen yang dikenal dengan *Tatsqif waTakwin*: Pembinaan dan pengkaderan untuk memberbesar gerakan ini menjadi suatu partai.

Kedua, Mugiyono (2013) yang berjudul **Relasi Nasionalisme dan Islam serta Pengaruhnya terhadap Kebangkitan Dunia Islam Global**. Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama, Vol. 14 No. 1 (2013). Dalam ulasan ini, pencipta mengkaji pertimbangan patriotisme di dunia Islam yang tercipta di mata publik, kemudian, pada saat itu, mengental dalam eksistensi politik negara sebagai negara-negara dengan ingin bergabung dengan sebuah negara. Menurut sudut pandang yang dapat diverifikasi, masuknya

patriotisme ke dalam masalah legislatif Muslim konon terjadi pada promosi abad kedua puluh. Sejumlah besar negara-negara Islam mengalami perkembangan patriot yang berencana untuk meniadakan domain Eropa dan membebaskan diri mereka sendiri atau secara mandiri mengatur dan mengendalikan negara mereka sendiri. Ide patriotisme diperlengkapi untuk menjadi alat pemersatu dan metode untuk memperjuangkan kebebasan. Namun tidak sama dengan negara-negara Timur Tengah yang beragama Islam, termasuk Mesir. Aliranisme mendapatkan reaksi dari daerah, termasuk menolak atau menoleransi, dengan alasan ada kualitas Islam yang dianut di mata publik. Dari sini kemudian garis besar antara patriotisme dan Islam.

Ketiga, Syariful Arif (2016) yang berjudul **Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia**. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial: Vol 7, No. 1 (2016) Arif. Dalam penelitian ini penulis membahas strategi pergerakan HTI tujuan utama HTI adalah untuk mewujudkan penegakkan syariah Islam seluas-luasnya. Menjadikan wasilah melalui dengan pendekatan syariah Islam sosio-politik, strategi yang pertama kali yaitu mencakup Khilafah Islamiyah sebagai Pra-syarat struktural bagi penerapan syariah. Didasarkan kepada ajaran Al-Quran, Sunah, praktik politik Nabi yang mendaulat khalifah sebagai penerapan. Strategi kedua yaitu membuat konstitusi syariah dalam pengelolaan sektor kenegaraan, sumber daya alam, kemiskinan, pendidikan Islam, tenaga kerja, *good government*, kriminalitas, pembangunan ekonomi, politik luar negeri, dan penanganan korupsi. Ini merupakan daya mengampanyekan gerakan atau partai Hizbut Tahrir Indonesia dengan melakukan menarik masa yang cukup banyak, tetapi juga menggunakan metode/cara propaganda dengan berkomunikasi persuasif. Membentuk pembinaan kader semacam dengan sistem politik untuk menyadarkan umat Islam dalam pemahaman khilafah, yang perlu diperjuangkan sehingga sampai saat ini Hizbut Tahrir Indonesia belum mencapai tahap akhir, yakni pengambil alihan kekuasaan (istilam al-hukm) (Rahmat, M. Imdadun;, 2005. hlm 115-118).

Keempat, M Muhammadiyah (2009) yang berjudul **Gerakan Pendirian Khilafah (Studi Terhadap Gagasan dan Strategi Hizbut Tahrir Indonesia)**. Thesis (Masters): Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, PPS Pasca Sarjana: 11 Februari

2020 08:36. Dalam penelitian ini penulis membahas konsep negara Islam modern, selama beberapa abad, kekhalifahan terus berlangsung di dunia Islam dalam satu bentuk ke bentuk terbentuk tertentu, baik dalam pengertian yang sebenarnya ataupun secara formal hingga abad modern ini. Dari sejarah silam bahwa kekhalifahan terakhir yaitu dari kekhalifahan Utsmaniyah. Di mana kekhalifahan runtuh diakibatkan konspirasi Yahudi dan orang Eropa, demi merebutkan tanah Palestina, akhirnya tidak mampu lagi mempertahankan kekuatan dan kehormatan Islam, negara tersebut ikut kehilangan legitimasinya sebagai pemimpin dunia Islam. Dengan era modern inilah Islam harus mengikuti perkembangan ilmuwan Eropa dari pemikiran dan teori, supaya umat Islam makin maju dalam dunia pengetahuan. Inilah merupakan doktrin orang barat sehingga pemahaman Islam lebih tertarik teori dan pemikiran tidak jelas dan akhirnya menjadi Islam sekuler. Di mana terdapat di negeri Indonesia dan Turki.

Kelima, Shabnun Tejani (2007) yang berjudul *Re-considering Chronologies of Nationalism and Communalism: The Khilafat Movement in Sind and its Aftermath, 1919–1927*. Volume. 27 issue. 3, page(s): 249-269 Issue published: November 1, 2007. Dalam penelitian ini penulis membahas sejarah pecahnya kubu India yaitu Hindu dan Islam. Di mana pada tahun 1920 seorang Gandhi pejuang Negara India mengampanyekan anti kerja sama terhadap kolonialisme secara massal. Gandhi menyatukan gerakan Khilafah (mobilisasi) kalangan Muslim India untuk melindungi posisi khalifah setelah kekalahan Ottoman. Di mana para cendekiawan melihat titik terang kerja sama antara India Hindu dan Muslim menjaga persatuan dalam gerakan nasionalisme. Akan tetapi pada tahun 1922 adanya perbedaan kepemimpinan sehingga menimbulkan konflik kekerasan antara komunitas Hindu dan Muslim di sejumlah daerah yang berbeda. Janji antara dua kubu menjadi hancur untuk kerja sama. Pengetahuan khilafah telah menjadi teologi. Pada artikel ini bertanya apakah gerakan khilafah memiliki cerita sendiri, dengan memeriksa kampanye di Daerah Sindh. Tentunya isu tersebut tidak ada kaitannya dengan dengan perbedaan agama dan nasionalisme India. Peristiwa tersebut dapat memperlihatkan bahwa perkembangan politik pada periode pasca khilafah sangat terbukti bagi nasionalisme dan komunalisme.

Keenam, Ghospal Krisna (1968) yang berjudul *The Khilafat Movement in India: The First Phase*. Journal of the Royal Asiatic Society , Volume. 100, Issue. 1 , January 1968 , pp. 37 – 53. Published online by Cambridge University Press: 15 March 2011. Dalam penelitian ini penulis membahas runtuhnya perang eropa dan jatuhnya kekaisaran Ottoman pada bulan November 1918. Bukan hanya kekaisaran Turki Ottoman tapi kekaisaran Austria dan Hongaria mengalami nasib yang sama. Bagi kaum Muslim India jatuhnya kekaisaran Ottoman sangat serius untuk dipersoalkan karena mereka mengharapkan kekuatan politik Islam. Kaum Muslim India sangat berempati terhadap kekaisaran Ottoman atau sultan Turki yang mengalami kekalahan perang terhadap pihak musuh yaitu Inggris. Karena umat Muslim India menganggap kesultanan Turki sebagai khalifah atau pemimpin duniawi dan spiritual (komunitas) agama Islam. Yang paling terpenting bagi mereka terhadap berdirinya khalifah sebagai persatuan umat Islam dan kekaisaran Turki pada saat itu sebagai simbol kekuasaan duniawi Islam. Muslim India sangat percaya pada idealisme persaudaraan Islam yang menjadi integral dari pandangan agama Islam. Tentunya status mereka umat Islam di India sebagai komunitas minoritas. Minat mereka terhadap khilafah sebagian besar karena fakta bahwa pusat kekuasaan Islam sebagai mencari perlindungan. Penyebaran nasionalisme akan menenggelamkan mereka dan membuat cemas untuk melestarikan dan memperkuat khilafah sebagai institusi sebagai titik agama Islam dan memobilisasi dalam pertahanan mereka pada kesatuan dunia Islam.

Ketujuh, Muhammad Pervez, dkk (2020) yang berjudul *The Emergence of the Khilafat Movement in Sargodha: Beginning of Agitational Politics and Impacts on the Freedom Movement*. Volume. V & Issue. IV, pages: 105-112. 10.31703/gpr.2020(V-IV).12. Dalam penelitian ini penulis membahas sejarah dimana Mustafa Kemal sudah menghapus institusi khilafah pada tahun 1924, tapi komite distrik khilafah di Sarghoda terus berfungsi. Rekan-rekan mereka yaitu Sial Sharif dan Bugvis dari Bhera memainkan peran distrik khilafah. Sementara para penguasa feodal telah mendukung pemerintahan Inggris. Sialvi dan Bugvis mengunjungi berbagai Kota dan Desa untuk menyampaikan pesan khilafah dengan kata-kata sederhana. Bugvis ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama satu setengah tahun. Dari gerakan khilafah, umat Islam di Sarghoda meningkat kesadaran

untuk melakukan gerakan Pakistan tahun 1940-47. Mereka menantang para penguasa feodal masa lalu dan penguasa masa kini sebagai faktor yang kuat, sehingga umat Islam memperoleh kemerdekaannya.

Kedelapan, Fadzli Bin Adam (2001) yang berjudul *The Concept of Khilafah According to Selected Sunni and Shi'i Qur'an Commentaries*. PhD thesis, University of Leeds, uk.bl.ethos.513969: 05 Februari 2010 09:48. Dalam penelitian ini penulis membahas memeriksa konsepsi Al Qur'an khilafah yang dipilih oleh sunni dan shi'i baik dalam periode klasik dan modern. Istilah khilafah digunakan oleh orang sunni yang tidak dapat dipisahkan dari Imama (pemimpin). Konsep ini muncul sangat awal dalam Islam dan memicu diskusi sangat dalam pada periode modern. Pada umumnya para cendekiawan dari abad ke 19 dan 14 dianggap telah memberikan sumbangsih besar pada pemikiran khilafah. Akan tetapi, ada beberapa pertimbangan yang diberikan pada tiga penulis dari gagasan modern untuk menyesuaikan dan merevisi konsep khilafah hingga taraf yang cukup besar. Tesis ini dimulai dengan diskusi tentang perkembangan sejarah dan sifat khilafah dalam Islam, memberikan gambaran umum tentang konsep khilafah dari kebutuhan, peran dan tugasnya dari banyak sudut pandang para cendekiawan Muslim. Terdapat Pasal-pasal yang menyediakan analisis teks akurat atas ayat-ayat Al-Quran yang dipilih memuat berbagai istilah yang relevan dengan konsep khilafah (imamah untuk Shi 'is) sebagaimana ditafsirkan oleh para komentator dari dua komunitas Muslim utama, Sunni dan syiah, khususnya Ithna 'ashariyyah (dua belas).

Kesembilan, Ishtiaq Ahmad dan Mahmud UI Hassan Butt (2012) yang berjudul *From Pan-Islamism to Muslim Nationalism: Khilafat Movement and the Struggle for Pakistan*. Pakistan Journal of History and Culture, Vol. XXXIII, No.2 (2012). Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Mustafa Kemal Pasha Tengah berjuang melawan Eropa untuk menghancurkan kekaisaran Ottoman. ketika kaum Muslim India melancarkan protes gerakan massal terhadap Negara Inggris yang dikenal sebagai gerakan khilafah. Gerakan tersebut merupakan ekspresi keterikatan sentimen antara kaum Muslim India terhadap Khalifah ottoman, yang mereka pandang sebagai sisa-sisa terakhir kesatuan dan kekuasaan Islam. Gerakan khilafah kehilangan momentum setelah Mustafa Kemal Attaturk

menghapuskan institusi khilafah di Turki, tetapi relevansinya berlanjut dalam politik Muslim India untuk politik massal dan berkontribusi pada pertumbuhan nasionalisme Muslim yang akhirnya menghasilkan Negara Pakistan pada tahun 1947.

Kesepuluh, Ihsan Yilmaz (2010) yang berjudul *The Varied Performance of Hizb ut-Tahrir: Success in Britain and Uzbekistan and Stalemate in Egypt and Turkey*. Journal of Muslim Minority Affairs: Volume 30, 2010 - Issue 4. Pages 501-517, Published online: 22 Dec 2010. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang gerakan hizbut tahrir sukses di Negara Inggris dan Uzbekistan sedangkan di Negara Mesir dan Turkey mengalami jalan buntu atau terbilang gagal. Makalah tersebut mempelajari pengalaman kaum muda Muslim di Inggris dan Uzbekistan dengan satu ideologi ekstremis dengan fokus pada hizbut tahrir dan pertentangan kasus Turki dan Mesir yang sulit untuk hizbut tahrir. Penelitian ini menganalisis mengapa Negara autokrasi seperti Mesir sangat terbatas pada hati dan pikiran anak pemuda Muslim, karena Negara Mesir lebih berpengaruh dalam demokrasi barat (Inggris). Di mana Negara Inggris memiliki ideologi ekstremis secara modernisasi melalui pembelajaran demokratis yang seharusnya berlangsung seperti yang dikatakan literatur ilmu politik. Dari sudut pandang perbandingan yang melibatkan empat Negara yang berbeda terdapat isu keterasingan, marginalisasi, diskriminasi, sosial ekonomi, kesenjangan politik dan teologis serta dampak kebijakan luar negeri terhadap pemikiran kaum muda Muslim dari ketahanan dan kerentanan mereka terhadap gerakan seperti hizbut tahrir.

Kesebelas, Frank Schneider (2006) yang berjudul *Hizbut Tahrir: A Threat Behind a Legal Facade?*. Accession Number: ADA457669, Master's thesis: NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CA, 2006-06-01. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang hizbut tahrir adalah sebuah kelompok fundamental Islam transnasional yang beroperasi lebih dari 40 negara dan memiliki kepentingan utama di Eropa, Timur Tengah dan Asia. Kelompok tersebut mengaku sebagai partai politik yang dilakukan tanpa kekerasan dan ideologinya adalah Islam. Tujuan mereka semata-mata bersifat politik dan tujuan utama mereka adalah menggulingkan rezim yang sudah ada untuk membangkitkan kekhalifahan dengan struktur dan kondisi yang mirip pada awal abad ke 7 Islam. Hizbut tahrir menolak

struktur Negara sekuler dan demokrasi modern sebagai mana berasal dari manusia bukan dari agama Islam. Tidak ada pemilihan umum ciptaan sekuler akan tetapi, Hizbut Tahrir tidak menolak teknologi yang modern. Penelitian ini akan berfokus pada Hizbut Tahrir tujuannya dan pilihan kelompok yang menyesuaikan strategi dalam kondisi politik di dalamnya. Tesis ini akan menyelidiki bagaimana Hizbut Tahrir sering menggunakan kerangka hukum untuk menyebarkan ideologi Islamisnya dan menjawab rekomendasi kebijakan yang mencerminkan spesifik area dan konteks dengan fokus pada kelompok ancaman utama ideologinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami merumuskan masalah sebagai berikut: Mengapa Pemikiran Khilafah Dalam Persepsi Hizbut Tahrir Indonesia Dianggap Berbahaya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pemerintah membubarkan gerakan hizbut tahrir di Indonesia dan persepsi para tokoh nasional terkait khilafah beserta pandangan dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sejarah munculnya hizbut tahrir ke Indonesia.

2. Kegunaan

a. Kegunaan akademik

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah bagi ilmu pengetahuan terkait pemikiran Khilafah. Khususnya terhadap pemikiran politik Islam, gerakan politik dan ideologi politik yang mengkaji pertentangan nasionalisme dan agama Islam (khilafah) studi kasus pembubaran hizbut tahrir di Indonesia.
- Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

b. Kegunaan praktis

- Penelitian diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui persepsi dari konsep khilafah. Memberikan

pengetahuan kepada para pembaca mengenai ideologi yang di jalankan oleh hizbut tahrir Indonesia (HTI) yaitu khilafah.

- Penelitian diharapkan dapat mengetahui wacana hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membuat negara Indonesia mejadikan negara *Khilafah* dan dengan cara praktik apa HTI memperjuangkan konsep *khilafah* berserta teori ideologi politik dan persepsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Setelah memperoleh hasil dari sebuah penelitian, maka hasil tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengembangkan media belajar penetapan secara lebih lanjut. Namun disamping itu juga hasil tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah nilai tambahan ilmu pengetahuan ilmiah di dalam suatu bidang pemikiran politik Islam dan nasionalisme.

2. Manfaat praktis

- Para mahasiswa bisa membaca hasil penelitian ini, guna menambahkan khasanah keilmuan mengenai perdebatan *ideologi* nasionalisme dan khilafah dalam studi kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.
- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) agar kalian mengetahui secara faktual dan memperdalam gerakan atau partai tersebut.
- Kemudian para dosen, dengan adanya penelitian ini bisa menjadikan bahan rujukan untuk mengkoreksi atau memberikan sebuah penilaian. Apakah penelitian ini berguna untuk para mahasiswa ataupun para cendikiawan untuk mengetahui sejarah nasionalisme dan khilafah.
- Kemudian manfaat bagi kampus universitas pembangunan nasional veteran Jakarta, dapat mengapresiasi hasil penelitian dan analisis ini dalam studi kasus pembubaran hizbut tahrir Indonesia (HTI) untuk membangun kembali sistem khilafah atau asas nilai keislaman (Al-Quran dan Hadis) ke Negara Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada proposal penelitian tersebut, disusun mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan dari prosedur pengajuan proposal tugas akhir yang terdiri beberapa

sub bab. Teknik penulisan ini sesuai dengan pedoman pada peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tugas Akhir Selain Skripsi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan orisinalitas, halaman pernyataan persetujuan publikasi, halaman pengesahan skripsi, halaman abstrak, halaman *abstract*, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran dan halaman daftar pustaka.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (praktis dan akademis), dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi: Landasan konsep dan teori yang berisi tentang konsep khilafah dan Pancasila, sedangkan teorinya menggunakan ideologi politik dan persepsi. Terdapat kerangka penelitian untuk menemukan jalan alurnya rumusan masalah tersebut dan menemukan hasil observasi dari penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menemukan informasi, agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

- A. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus eksplanatif dan deskriptif, guna memperoleh paparan faktual yang berkaitan dengan variabel penelitian.
- B. Objek penelitian ini adalah gerakan Hizbut Tahrir Indonesia dianggap berbahaya bagi negara Indonesia yang berpaham *khilafah*.
- C. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode observasi, metode wawancara, *library research method* dan metode *online*.
- D. Sumber informasi eksplorasi direncanakan untuk mengkaji kepentingan yang terkandung dalam isu yang akan dibicarakan agar informasi tersebut lebih

tepat. Terlebih lagi, memiliki sumber yang dapat diandalkan, agar tidak memiliki penyimpangan dalam eksplorasi yang disengaja.

- E. Teknis analisis data dalam metode kualitatif sendiri sebenarnya tidak ada aturan yang jelas mengenai proses analisis data.
- F. Tabel rencana waktu merupakan untuk mempermudah proses waktu penelitian skripsi agar teratur dan tepat sasaran dari hasil akhir penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kualitatif, serta pembahasan hasil penelitian.

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam :

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas akhir dari hasil penelitian dan pembahasan. Di mana terdapat berupa:

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB 6 DAFTAR PUSTAKA

Bab ini mengumpulkan hasil referensi dari penelitian. Pengumpulan referensi tersebut, di mulai dari bab satu sampai bab lima. Tentunya referensi ini untuk menghindari plagiasi yang tidak sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.